

BAB II

PERSPEKTIF

KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA

MENGENAI REUNIFIKASI KOREA

Bab ini membahas tentang pengertian reunifikasi, arti penting reunifikasi Korea, dan sudut pandang mengenai reunifikasi yang dilihat dari masing-masing Korea Selatan maupun Korea Utara. Sudut pandang tersebut dimaksudkan agar mengetahui tujuan atau kepentingan apa yang diinginkan oleh masing-masing Korea dalam keinginan untuk mewujudkan reunifikasi.

A. Pengertian Reunifikasi

Reunifikasi pada dasarnya mengacu pada negara atau kota yang terbagi menjadi dua atau beberapa bagian untuk waktu yang lama dan berupaya untuk menyatu kembali.¹ Negara-negara tersebut pernah menjadi satu negara-bangsa kemudian dibagi secara politis, ekonomi, maupun secara sosial. Selain itu, beberapa faktor politik, ekonomi, dan sosial juga berperan dalam membentuk jalan yang mulus menuju reunifikasi. Sementara Reunifikasi Korea merupakan penyatuan negara Korea Selatan dan negara Korea Utara di bawah satu pemerintahan. Hal ini akan membawa kedua negara bersama-sama bersatu di Semenanjung Korea. Reunifikasi adalah proses panjang mengatasi ketidakpercayaan dan meningkatkan saling pengertian untuk tujuan menyelesaikan konflik secara damai.

Keinginan Korea untuk reunifikasi didasarkan pada sejarah panjang dan membanggakan yang membuat

¹ Collins. (1819). *Collins*. Diakses pada Maret 20, 2017, from collinsdictionary.com:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>

Korea berkembang menjadi negara yang memiliki budaya dan etnis homogen dengan rasa persatuan nasional yang dalam. Hal ini dikaitkan dengan pengaruh signifikan dari Tiongkok karena telah menghasilkan orang-orang Korea yang memiliki ikatan kuat dengan keluarga, budaya, dan sejarah. Bagi kebanyakan orang Korea, pembagian semenanjung saat ini adalah penyimpangan sementara dan seiring berjalannya waktu akan teratasi.

Reunifikasi sendiri bukanlah masalah "jika", tapi "kapan". Pertanyaan utama dalam reunifikasi adalah bagaimana negara dapat mempersiapkan diri dan menciptakan hari ini dengan mempromosikan suatu perdamaian dan kesejahteraan. Berakhirnya pembagian Korea harus dilihat secara politis, tapi bukan sebagai suatu posisi politik ekstrem untuk pihak kanan atau kiri. Sebaliknya, hal ini harus dilihat sebagai penempatan lahan tengah yang luas, meliputi petak besar spektrum politik.

Reunifikasi merupakan isu Korea, tapi hal ini tidak hanya menyentuh dan berpengaruh bagi kawasan di Semenanjung Korea, melainkan akan menyentuh kepentingan masyarakat internasional. Persiapan yang memadai di tingkat internasional memerlukan sosialisasi dari negara-negara tetangga tentang proses yang mungkin terjadi dan membentuk sejumlah solusi positif.

B. Arti Penting Reunifikasi Korea

Kedua Korea masih berada di persimpangan jalan dengan para pemimpin di kedua negara. Putri mantan Presiden Park Chung-hee, Park Geun Hye, terpilih sebagai Presiden Korea Selatan, mulai menjabat pada Februari 2013 dengan mandat lima tahun sampai 2018. Di Korea Utara, cucu ketiga, Kim Jong-un, dari pendiri Kim Il-sung telah memerintah negara tersebut sejak kematian ayahnya Kim Jong-il di Desember 2011. Kedua pemimpin Korea berbagi tanggung jawab untuk

memenuhi harapan masyarakat mereka: yaitu untuk mempertahankan warisan leluhur mereka tetapi juga untuk membawa perubahan kepada menormalkan hubungan dan akhirnya menyatukan negara.

Kenangan menyakitkan dari Perang Korea membawa ketidakpercayaan dan permusuhan di antara Korea. Namun, harapan untuk satu bangsa yang diwarisi dari nenek moyang yang sama membuat pemimpin Korea ingin mengambil langkah-langkah menuju reunifikasi. Reunifikasi Korea hanya dapat dicapai melalui langkah demi langkah dan kerjasama jangka panjang yang menjamin kedua negara memiliki waktu yang cukup untuk membangun kembali identitas umum.

Selain itu, kemungkinan reunifikasi juga harus didukung dengan kekuatan ekonomi yang cukup. Membangun masyarakat nasional baru di Korea setelah reunifikasi mungkin akan lebih sulit daripada penyatuan politik terlepas dari bagaimana hal itu dicapai. Hal ini karena kedua Korea telah mengembangkan perbedaan terkait nilai, sikap, keyakinan, dan perilaku dalam lembaga-lembaga sosial utama mereka selama beberapa generasi sejak terpisah.²

Sebagian besar orang Korea memimpikan reunifikasi, yaitu suatu masa di masa depan ketika Korea Utara dan Selatan dapat bergabung untuk menciptakan kembali keutuhan Korea sebelum pembagian dan penjajahan Jepang. Keinginan Korea untuk reunifikasi didasarkan pada sejarah panjang dan membanggakan dari kesatuan yang melihat Korea berkembang menjadi negara budaya yang memiliki etnis homogen dengan rasa persatuan mendalam. Latar belakang ini lah yang mendorong Dua Korea untuk bersatu kembali meskipun selama beberapa waktu terjadi ketegangan dan permusuhan antara Utara dan Selatan. Untuk kebanyakan

² Betul, O. S. (2015). North Korea-South Korea Relations Towards Successful Reunification. 2-87.

orang Korea, pembagian semenanjung Korea hanyalah sebuah penyimpangan sementara dan cepat atau lambat akan dapat diselesaikan.

Terlepas dari hal ini, terbentuklah skenario reunifikasi yang digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan reunifikasi. Skenario reunifikasi dapat dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu reunifikasi melalui penyerapan, reunifikasi secara damai dan terintegrasi, reunifikasi melalui perang atau konflik, serta reunifikasi melalui campur tangan asing.³

1. Reunifikasi melalui Penyerapan

Reunifikasi ini dimaksudkan dengan melakukan penyerapan satu negara kepada negara lainnya atau pengambil alihan suatu negara oleh negara lainnya. Skenario ini umumnya dapat terjadi karena runtuhnya Korea Utara ketika terjadi gejolak yang menyebabkan tekanan pada rezimnya dan menciptakan ketidakstabilan politik. Hal tersebut membuat kondisi nasional Korea Utara menjadi semakin memburuk, baik pemerintahan maupun pemimpinnya sudah tidak dapat lagi mengatasinya. Kemudian Korea Selatan masuk dengan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk mengisolasi rezim pemerintahan Korea Utara. Lambat laun Korea Selatan dapat menguasai Korea Utara dan menjadikannya sebagai bagian dari di bawah sistem pemerintahannya.⁴

Namun, jika Korea Selatan berhasil menundukkan rezim Korea Utara, maka beban ekonomi yang ditanggung oleh Korea Selatan akan semakin berat mengingat Korea Utara

³ Jonathan, D. P. (2001). Korean Unification:.. *The Brown Journal of World Affairs*, 77-90.

⁴ Mega, A. (2015). Masa Depan Reunifikasi Korea. *UTA45Jakarta*, 33-61.

merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai masalah terkait perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Korea Selatan akan dituntut untuk membangun Korea Utara sama seperti kondisi ekonominya untuk menghindari kesenjangan antara Utara dan Selatan

2. Reunifikasi secara Damai

Reunifikasi secara damai dimaksudkan dengan adanya konsesus bersama kedua negara. Korea Selatan selalu berupaya untuk mewujudkan reunifikasi secara damai. Meskipun tidak bisa mewujudkan reunifikasi secara cepat, tapi dapat memberikan kesempatan kepada kedua Korea untuk terus melakukan dialog reunifikasi. Kedua Korea harus menemukan formula reunifikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui integrasi bertahap. Integrasi dan konsensus untuk menuju reunifikasi damai berarti kedua Korea membutuhkan pengertian dan persamaan persepsi mengenai reunifikasi, termasuk sudut pandang politik dan mengesampingkan permusuhan serta menghilangkan perbedaan ideologi.

Selain itu, kedua Korea harus menghilangkan ketegangan militer dan melakukan perjanjian damai. Untuk mewujudkannya, kedua Korea dapat menggunakan dialog yang telah dijalankan untuk menciptakan integrasi yang dapat membawa perwujudan reunifikasi. Selama negosiasi, masing-masing Korea menghasilkan beberapa proposal strategi reunifikasi yang diharapkan dapat disetujui oleh keduanya. Dalam proses dialog dan negosiasi, kedua negara harus memandang satu sama lain sebagai saudara yang terpisah dan berupaya untuk bersatu, bukan sebagai musuh seperti saat Perang Korea.

3. Reunifikasi melalui Perang

Reunifikasi ini dimaksudkan dengan menggunakan kekuatan. Hal ini dapat terjadi jika hubungan bilateral antara kedua Korea benar-benar terputus, sehingga segala konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak dapat diselesaikan melalui dialog atau jalur perdamaian. Selain itu, skenario ini juga bisa terjadi jika Amerika menginvasi Korea Utara dengan alasan pengembangan nuklir dan misil Korea Utara mengancam perdamaian dunia. Meskipun Korea Utara kalah dalam kampanye konvensional melawan Korea Selatan, Korea Utara dapat memulai perang putus asa atau dengan mengandalkan militernya yang kuat.⁵ Korea Utara dapat melakukan perang preventif untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam negosiasi.

Namun, skenario ini tentu menimbulkan dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi kawasan di Semenanjung Korea tapi juga bagi keamanan di kawasan internasional. Reunifikasi melalui perang atau konflik inilah yang membuat semua perencana dan pemimpin militer Korea Selatan ketakutan. Ancaman paling parah dalam skenario ini adalah opsi Korea Utara menggunakan nuklirnya. Skenario ini dapat seara teoritis menjadi pengulangan dari invasi Korea Utara pada tahun 1950. Meskipun saat ini pasukan AS dan Korea Selatan siap untuk menyerap serangan Korea Utara dan kemudian memulai serangan balik gabungan.

⁵ Colonel, D. C. (2008). *Prospects from Korean Reunification*. <http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/>.

4. Reunifikasi melalui Campur Tangan Asing

Skenario ini menggambarkan Korea Utara yang mengalami krisis dalam negeri dan dapat menyebabkan Korea Utara membentuk kebijakan konfrontasi. Kegagalan mengontrol krisis tersebut dapat menggoyahkan politik dalam negeri dan pemerintahan yang dapat menghasilkan ketidakstabilan karena berbagai tekanan sosial dan politik. Dalam situasi di ambang keruntuhan, pihak oposisi dapat mengundang intervensi pihak asing untuk masuk ke Korea Utara sebagai pasukan perdamaian atau meminta bantuan ekonomi.

Kemungkinan yang dilakukan Korea Utara adalah mengundang intervensi Amerika Serikat atas nama PBB atau Amerika Serikat yang akan meminta legalisasi PBB untuk mengintervensi Korut. Intervensi Amerika memang sulit terwujud jika melihat arah politik Korea Utara. Namun, Tiongkok dapat menggunakan hak veto-nya atas tindakan Amerika tersebut, sehingga justru intervensi yang paling mungkin terjadi adalah oleh Tiongkok, mengingat kedekatan geografis dan historis antara Korea Utara dan Tiongkok. Selain itu, Tiongkok merupakan pemberi bantuan terbesar kepada Korea Utara.⁶

Intervensi Tiongkok melalui pasukan perdamaian dapat menciptakan perwakilan jangka panjang oleh Tiongkok atas Korea Utara. Jika skenario tersebut dapat terjadi, reunifikasi dapat tercipta setelah periode transisi dari masa intervensi Tiongkok di Korea Utara tanpa mengesampingkan faktor kembali stabilnya politik dalam negeri Korea Utara, pulihnya ketertiban sosial, dan terciptanya pemerintahan yang damai. Namun, di sisi lain skenario ini akan menghasilkan *deadlock* karena

⁶ Mega. A. Op.cit., hlm. 47

dapat terjadi pengambilalihan Korea Utara oleh Tiongkok yang justru akan menjadikan Korea Utara sebagai bagian dari Tiongkok. Hal tersebut justru membuat reunifikasi Korea akan semakin sulit terwujud akibat perdebatan mengenai status politik Korea Utara.

C. Perspektif Korea Selatan terhadap Reunifikasi

Hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara sangat rumit. Sementara tujuan akhir dari hubungan ini tetap menciptakan reunifikasi. Tujuan itu tampaknya tidak lebih dekat sampai saat ini daripada dekade yang lalu. Pemerintah Korea Selatan telah melakukan berbagai pilihan kebijakan di bawah pemerintahan yang berbeda. Setiap pemimpin Korea Selatan berharap untuk memperkuat warisannya dengan menjadi pemimpin pertama yang menempuh jalan jelas menuju reunifikasi.

Reunifikasi Korea secara damai merupakan tujuan strategis utama Korea Selatan yang mencerminkan aspirasi rakyat Korea untuk mengakhiri tragedi yang sedang berlangsung di kedua Korea.⁷ Hampir 69 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, bangsa Korea tetap terbagi menjadi dua entitas yang saling bermusuhan. Korea yang bersatu kembali dengan damai di bawah naungan Seoul dirasa akan menghapus tantangan utama bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Timur. Selain itu, reunifikasi secara damai menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai lingkungan regional yang lebih harmonis dan kooperatif. Negara-negara tetangga maupun masyarakat internasional juga tidak perlu khawatir dengan ancaman penggunaan senjata pemusnah massal, seperti halnya senjata nuklir dan teknologi rudal.

⁷ Evans, R. (2014). Reunifying Korea: Challenges, Uncertainties, and an Agenda for US-ROK Cooperation. *The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference*, 191-218.

Korea yang bersatu di bawah kepemimpinan Seoul akan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan kebutuhan rakyatnya. Sebuah sistem yang membuat 24 juta orang Korea miskin, brutal, terisolasi, dan kurang gizi selama beberapa dekade akan segera berakhir. Reunifikasi akan mengarah pada salah satu transformasi paling dramatis dari prospek sebuah negara dalam sejarah. Korea Selatan mencatat keberhasilannya dalam mengangkat warganya sendiri keluar dari kemiskinan dan dapat membangun dirinya sebagai pemimpin global dalam industri dan perdagangan. Selain itu, Korea Selatan juga dapat menciptakan sebuah negara dengan komitmen yang mendalam terhadap demokrasi dan hak asasi manusia serta menunjukkan potensi kepemimpinan Seoul untuk mengubah Korea yang akan bersatu kembali.

Argumen tentang kemanusiaan, hak asasi manusia, ekonomi, regional, dan non-proliferasi untuk reunifikasi Semenanjung Korea yang dipimpin oleh Seoul mendapat respon baik di Amerika Serikat dan masyarakat internasional pada umumnya yang sangat mendukung reunifikasi. Pengakuan Amerika bahwa proses yang dipimpin oleh Korea Selatan merupakan pilihan terbaik untuk reunifikasi tercermin dalam *U.S.-ROK "Joint Vision Statement," tahun 2009*, yang mencakup tujuan untuk mencapai reunifikasi secara damai atas prinsip-prinsip demokrasi bebas dan sebuah ekonomi pasar.⁸ Korea Selatan dapat mengambil kenyamanan yang cukup besar dalam kenyataan bahwa ada juga masyarakat internasional yang menerima reunifikasi di bawah undang-undang Seoul. Tugas utama Korea Selatan untuk ke depannya adalah meningkatkan dukungan internasional untuk tujuan tersebut dan upaya Korea Selatan untuk menciptakan kondisi yang baus dalam merealisasikannya.

⁸ Ibid.

Pemerintah Korea Selatan selama beberapa generasi telah berpandangan bahwa penyatuan dan kelahiran negara kesatuan harus direalisasikan melalui pemilihan umum berdasarkan demokrasi liberal dan ekonomi pasar. Garis dasar reunifikasi bagi Korea Selatan dimulai secara bertahap, langkah demi langkah, dan mengutamakan perdamaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan dalam mencapai reunifikasi. Salah satu tujuan utama kebijakan reunifikasi Korea Selatan adalah untuk mendorong perubahan dalam sistem Korea Utara. Perubahan seperti itu demi kebaikan reunifikasi jika dilaksanakan dengan cepat dan damai,

Formula reunifikasi resmi Korea Selatan yang mewakili kebijakan reunifikasinya adalah pendekatan unifikasi dalam 3 tahap, yaitu: 1) fase rekonsiliasi dan kerja sama, 2) fase Persemakmuran Korea, dan 3) fase akhir dari penyatuan Korea sebagai *one-nation one-state*.⁹

Tahap pertama mengenai 'rekonsiliasi dan kerjasama' dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati dua rezim bersama Korea. Hal ini juga dilakukan bersamaan dengan menghapuskan hubungan ketidakpercayaan serta konfrontasi di antara keduanya. Tahap ini berusaha mengelola keadaan secara damai dan mengejar koeksistensi damai melalui pertukaran serta kerja sama di berbagai sektor seperti ekonomi, masyarakat maupun budaya. Bagaimanapun kerjasama ekonomi, sosial, dan pertukaran budaya telah dianggap gagal sebelumnya untuk membentuk kepercayaan politik dan militer. Krisis militer seperti tenggelamnya kapal Cheonan Korea Selatan, penembakan Pulau Yeonpyeong dan tiga uji coba nuklir menunjukkan jalan panjang di depan dalam membangun tahap rekonsiliasi dan kerjasama.

⁹ Young, H. P. (2014). South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations. *The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference*. Seoul.

Tahap kedua yaitu menciptakan Persemakmuran Korea. Tahap ini menempati posisi perantara dalam keseluruhan proses formula penyatuan dan dirancang untuk melakukan peran fungsional tertentu melalui penciptaan masyarakat nasional, khususnya ekonomi dan sosial (budaya) masyarakat. Akibatnya, Persemakmuran Korea terdiri dari pembentukan dua negara bagian yang terpisah dengan hak masing-masing untuk diplomasi, ekonomi, dan keamanannya. Namun, pada saat yang sama juga menunjukkan adanya 'ikatan khusus' yang memadukan Persemakmuran Korea dan membolehkan keduanya untuk membahas isu tertentu serta menyelesaikan masalah-masalah yang tertunda. Singkatnya, Persemakmuran Korea adalah sistem peralihan dalam proses pembentukan negara kesatuan.

Untuk menjalankan Persemakmuran Korea, mekanisme seperti pertemuan antar-Korea sebagai badan tertinggi, pertemuan kabinet antar-Korea, serta dewan antar-Korea harus diwujudkan. Dalam proses pembentukan Persemakmuran Korea, maka harus membentuk sebuah badan ekonomi dan sosial, serta membangun lingkungan hidup bersama untuk mempersiapkan reunifikasi. Pada akhirnya, dewan antar-Korea harus membentuk konstitusi reunifikasi dan mengadakan pemilihan umum untuk meresmikan badan legislatif serta pemerintah reunifikasi yang menunjukkan negara kesatuan.

Presiden Korea Selatan Park Geun Hye mengumumkan niatnya untuk melakukan reunifikasi di awal masa jabatannya ketika Presiden Park merujuk pada reunifikasi sebagai "*bonanza*" pada awal tahun 2014.¹⁰ Hal ini menunjukkan peran reunifikasi akan dimainkan dalam mendorong ekonomi Korea Selatan yang dianggap

¹⁰ Jiyoon, K., Friedhoff, K., Chungku, K., & Euicheol, L. (2014). South Korean Attitudes toward North Korea and Reunification. *The Asan Institute for Policy Studies*, 1-27.

mengalami kemacetan. Park Geun Hye juga menciptakan sebuah komisi kepresidenan baru - *The Preparatory Commission for Unificatio* - untuk membantu menyusun langkah pertama untuk memenuhi rencana tersebut.

Selain itu, Presiden Park Geun Hye berpendapat bahwa kepercayaan adalah kata kunci utama dalam mewujudkan reunifikasi.¹¹ Park Geun Hye percaya bahwa kurangnya kepercayaan mendasar dalam hubungan antar-Korea adalah alasan utama masalah yang terjadi. Para ahli melihat beberapa kesamaan antara kebijakannya dan kebijakan Presiden Lee Myung Bak dalam hal mempertahankan beberapa gagasan dan prinsip tertentu. Sementara untuk mengimbangi hal tersebut, Presiden Park menuturkan bahwa kebijakan Korea Utara harus dikembangkan lebih lanjut, baik Korea Utara maupun Korea Selatan harus siap untuk berubah dan kebijakan Korea Utara tidak boleh dirombak setiap kali terjadi perubahan pemerintahan.

D. Perspektif Korea Utara terhadap Reunifikasi

Jika membicarakan tentang reunifikasi, Korea Utara memiliki dua persepsi yang tidak berubah sejak perpecahan di Semenanjung Korea. Persepsi pertama adalah mengenai pembagian atau perpisahan Korea ini merupakan hasil kekuatan eksternal atau 'kekuatan imperialis'. Kedua adalah masalah reunifikasi merupakan masalah untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa di seluruh negeri. Oleh karena itu, untuk mencapai reunifikasi, Amerika Serikat harus dikecam karena Amerika terus melakukan campur tangan di Korea Selatan terutama terkait hubungan kedua Korea.

Korea Utara memiliki gagasan reunifikasinya sendiri yang pada dasarnya bertentangan dengan pendapat Korea Selatan dan pemerintahan Pyongyang sangat

¹¹ Ibid.

berkomitmen terhadap gagasannya. Bagi Pyongyang, reunifikasi akan dicapai dengan syarat-syaratnya, di mana Korea Utara yang akan memimpin dengan sistem politik dan sosial Korea Utara diberlakukan di Korea Selatan.¹² Pendekatan Pyongyang terhadap reunifikasi didukung oleh ideologi yang kaku dan sistem otoriter militan. Niat Pyongyang untuk memaksakan sosialisme di Selatan juga didukung oleh sebuah kekuatan militer besar, yang sering digunakan oleh Korea Utara untuk melawan Korea Selatan.

Pesan yang disampaikan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan adalah bahwa Korea Utara tidak berniat diubah atau diserap ke dalam Korea Selatan. Ini adalah poin yang sangat penting karena di jantung kebijakan yang dijalankan oleh beberapa pemerintah Korea Selatan berturut-turut adalah gagasan bahwa Korea Utara dapat ditransformasikan, rekonsiliasi dapat membawa perubahan mendasar dalam hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, zona kerjasama antara Utara dan Selatan dapat diperluas, kepercayaan Utara-Selatan yang sesungguhnya dapat dibangun, dan lingkungan baru yang diciptakan oleh perkembangan ini dapat menjadi dasar reunifikasi.

Reunifikasi yang mengacu pada konsep 'Negara' menurut Korea Utara menyiratkan istilah yang digunakan dalam *'Chosun Nation First Policy'* (*Joseon Minjok Cheil Ju-ui*), yaitu sebuah 'negara' eksklusif yang terisolasi. Selain itu, 'kemerdekaan' tidak mengacu pada konsep di mana seseorang diberi martabat. Sebaliknya, hal ini mengacu pada komponen dalam kelompok yang mendapat pengakuan sebagai 'kehidupan sosio-politik'

¹² Evans, R, Op.cit., hal. 196.

begitu tunduk pada 'Pemimpin Tertinggi', di bawah ideologi Juche.¹³

Persepsi para pemimpin Korea Utara tentang situasi politik didasarkan pada trauma masa lalu karena telah dikepung oleh kaum imperialis sejak Perang Korea yang berakhir pada tahun 1953. Ancaman imperialis terbesar berasal dari AS di era Perang Dingin. Korea Utara berpendapat bahwa tidak ada tempat di bumi yang tidak terpengaruh oleh pengaruh jahat Amerika Serikat dan tidak ada negara yang tidak merasakan ancaman agresi dari Amerika. Hal ini juga mengesakan bahwa Amerika Serikat pernah mengancam Korea Utara dengan serangan militer dan mengganggu reunifikasi nasional.

Sebenarnya, Korea Utara juga meramalkan runtuhnya kekuasaan Amerika yang mewakili jatuhnya imperialisme sebagai hukum objektif pembangunan sejarah. Korea Utara melihat Korea Selatan dari perspektif yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Korea Selatan telah ditandai sebagai koloni imperialis Amerika dan pemerintah Korea Selatan didefinisikan sebagai "rezim boneka" atau "rezim yang tidak manusiawi dan reaksioner." Korea Utara telah mengusulkan agar Korea Selatan menciptakan sebuah basis demokratis revolusioner untuk mengubah seluruh semenanjung Korea menjadi sebuah negara komunis.

Perubahan yang dimaksudkan menunjukkan dua skema penyatuan yang berbeda. Pertama adalah penyatuan oleh kekuatan militer belaka dan kedua adalah reunifikasi dengan meminta bantuan dari aktivis anti-pemerintah Korea Selatan dalam merevolusi bagian Selatan. Korea Utara juga mulai menerapkan taktik reunifikasi ganda, yaitu provokasi militer dan pengejaran strategi "front persatuan" menuju reunifikasi.

¹³ Young, H. P. (2014). South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations. The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference. Seoul.

Sejak paruh kedua tahun 1980an, terutama setelah penyatuan Jerman, pandangan Korea Utara tentang penyatuan nasional telah bersifat defensive. Dalam pesan Tahun Baru pada tahun 1991, Kim Il-sung dengan tegas menyatakan bahwa dia menentang "cara makan dan dimakan" artinya, penyatuan dengan cara penyerapan dan menyerukan penyatuan nasional di bawah *Koryo Confederation System*.¹⁴

Korea Utara yang menyerukan reunifikasi nasional di bawah bendera komunis selama era Perang Dingin, kini telah beralih ke sebuah kebijakan koeksistensi untuk mempertahankan "Sosialisme Gaya Kita Sendiri." Pergeseran tersebut tercermin dalam "Lima Poin Pedoman untuk Reunifikasi Tanah Air "(Mei 1990) dan "sepuluh poin panduan prinsip untuk *All-Korea Unity* "(April 1993). Meski begitu, sulit untuk mengatakan bahwa Korea Utara telah benar-benar melepaskan gagasan untuk mempersatukan Korea dengan kekuatan senjata.¹⁵

Agresi militer yang tak henti-hentinya serta peningkatan kekuatan militer oleh Kim Il-sung dan Kim Jong-il, maupun propaganda Kim Jong-il yang meminta transformasi Korea Utara menjadi raksasa militer, semuanya menunjukkan kelanjutan harapan masa lalu. Seperti pemerintah Korea Selatan sebelumnya, Korea Utara telah mendefinisikan pemerintahan Park Geun Hye saat ini sebagai rezim koloni imperialis Amerika Serikat atau "rezim bawahan, fasis, dan anti-reunifikasi."

¹⁴ Betul, O. S. (2015). North Korea-South Korea Relations Towards Successful Reunification. 2-87.

¹⁵ Young, H. P., Op.cit.